

ASAS PERLAKUAN YANG SAMA PADA PENUNJUKAN LANGSUNG BUMN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PLN (PERSERO)

Studi Kasus Terhadap Penunjukan Langsung PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Oleh PT PLN (Persero) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan
Transmisi 500 kV Muara Enim - New Aurduri

Reky Seftriyanto¹

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Pembimbing: Richo Andi Wibowo

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang menjadi dasar bagi PT PLN (Persero) dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sekaligus menganalisis pertimbangan yang menjadi dasar pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk apabila ditinjau dari norma-norma hukum positif nasional serta asas-asas pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang berlaku internasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) pada pembangunan SUTET 500 kV Sumatera ruas Muara Enim - New Aurduri dengan menggunakan metode penunjukan langsung kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tepat apabila ditinjau dari norma-norma hukum positif nasional.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari asas-asas pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang berlaku internasional khususnya prinsip *competitive neutrality*, maka pengadaan barang dan jasa pembangunan SUTET 500 kV Sumatera ruas Muara Enim - New Aurduri dengan menggunakan metode penunjukan langsung kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) tidak menganut prinsip *competitive neutrality*. Dengan tidak menganut prinsip *competitive neutrality*, maka pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) menjadi tidak kompetitif dan tidak terdapat perlakuan yang sama dalam peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Penunjukan Langsung.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2017, email: rekyss@yahoo.com.

THE SAME TREATMENT PRIVATE FOR DIRECT APPLICATION OF SOEs IN PROCUREMENT OF PT PLN (PERSERO) GOODS AND SERVICES

Case Study of Direct Appointment of PT Waskita Karya (Persero) Tbk By PT PLN (Persero) in Procurement of Goods and Services for 500 kV Transmission of Muara Enim - New Aurduri

Reky Seftriyanto²

Master of Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

Advisor: Richo Andi Wibowo

This study aims to analyze the considerations that form the basis for PT PLN (Persero) in carrying out the procurement of goods and services using the method of direct appointment to PT Waskita Karya (Persero) Tbk while analyzing the considerations that are the basis for the procurement of goods and services using direct appointment methods to PT Waskita Karya (Persero) Tbk when viewed from national positive legal norms as well as principles for the procurement of goods and services in state-owned enterprises that are internationally valid.

The results of this study indicate that the procurement of goods and services carried out by PT PLN (Persero) on the construction of a Sumatra 500 kV SUTET segment of Muara Enim - New Aurduri using the method of direct appointment to PT Waskita Karya (Persero) Tbk right when viewed from legal norms positive national.

Furthermore, when viewed from the principles of procurement of goods and services in state-owned enterprises that apply internationally, especially the principle of competitive neutrality, the procurement of goods and services for the construction of the Sumatra 500 kV SUTET in the Muara Enim - New Aurduri segment using the direct appointment method to PT Waskita Karya (Persero) Tbk carried out by PT PLN (Persero) does not adhere to the principle of competitive neutrality. By not adhering to the principle of competitive neutrality, the procurement of goods and services using the method of direct appointment conducted by PT PLN (Persero) becomes uncompetitive and there is no equal treatment in the regulations and procedures for the procurement of goods and services.

Keywords: Procurement of Goods and Services, Direct Appointment.

² Master of Law student from Gadjah Mada University, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Batch 2017, email: rekyss@yahoo.com.